

RCEP dan TPPA:

Memperbaharui Serangan Neoliberal di Asia Pacific

Primer untuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
dan Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)



Jaringan People Over Profit

People Over Profit atau Keuntungan Bagi Rakyat adalah sebuah jaringan kampanye yang menyatukan gerakan rakyat dan berbagai NGO di seluruh dunia untuk menghentikan Free Trade Agreements (FTAs) atau Kesepakatan-Kesepakatan Perdagangan Bebas dan penjarahan korporasi. Kesepakatan yang dimotori oleh perusahaan (FTAs) telah mengancam demokrasi, hak, dan kehidupan kita. Kesepakatan tersebut menciptakan kekhawatiran serius secara luas dan semakin meningkat di berbagai wilayah dengan berbagai macam dampak terhadap berbagai sektor dan masyarakat, dan melahirkan provokasi perlawanan yang meluas di berbagai negara.



People Over Profit (POP) adalah sebuah upaya sumbangsih untuk membangun perlawanan populer secara global melawan FTAs dan penjarahan korporasi transnasional. Kami mempromosikan dan mendukung perjuangan rakyat di seluruh dunia melawan FTAs dan berbagai bentuk serangan neoliberal lainnya melalui proses berbagi analisis, informasi dan koordinasi aksi di tingkat nasional, regional, dan global.

Dikarenakan serangan terhadap hak-hak kita semakin gencar, maka kita harus berjuang secara kolektif. Kami tidak sekadar menuntut upah layak bagi buruh, tanah untuk penggarap, dan akses gratis dan terjangkau untuk mendapatkan obat-obatan, kesehatan publik dan pendidikan. Kami berjuang untuk sistem perdagangan yang pro-rakyat yang didirikan secara kuat atas prinsip-prinsip solidaritas, kerjasama, dan saling menopang antar bangsa. Sebuah sistem yang mendorong dan menguatkan keadulatan dan hak-hak rakyat; mengutamakan persahabatan dan perdamaian yang berjalannya beriringan, dan tanggung jawab langsung oleh negara dan sektor swasta terhadap rakyat – sebuah tuntutan perdagangan dunia yang menjawab kebutuhan rakyat, bukan elit korporasi.

Sekretariat People Over Profit Network

Alamat: Asia Pacific Research Network (APRN) 114 Timog Avenue, Diliman QC

Telephone: 927 7060 to 62

Email: mpascual@aprnet.org

Facebook: fb.me/peoplevsftas

Twitter: [@peoplevsftas](https://twitter.com/peoplevsftas)

Beberapa tahun terakhir telah menampakkan kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. Dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan WTO, fokus monopoli modal justru dialihkan pada Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi atau Free Trade and Investment Agreements (FTAs) melalui skema bilateral dan regional yang bertujuan untuk menindas tenaga kerja, menghancurkan lingkungan, kesehatan, dan aturan keuangan, sementara di sisi lain justru semakin meningkatkan keuntungan dan penguasaan korporasi. Proliferasi luas FTA dalam dekade terakhir telah mengakibatkan desentralisasi serangan neoliberal ke berbagai belahan dunia yang telah melemahkan hak-hak pekerja secara efektif dan menggosur masyarakat petani dan kelompok minoritas nasional dari tanah mereka.

Strategi baru ini semakin terasa di seluruh Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership/Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership/Kerjasama Regional Komprehensif bidang Ekonomi). Kedua perjanjian ini jika disahkan, akan mengancam hak-hak rakyat di wilayah tersebut. Kedua Perjanjian perdagangan ini juga menunjukkan tentang meningkatnya persaingan dan adu kepentingan antara AS dan Cina di Asia Pasifik. Namun, harus ditegaskan bahwa baik RCEP atau TPPA tidak akan menjawab tuntutan rakyat yang telah lama diperjuangkan untuk perdagangan global dan tatanan ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk elit korporasi.

Apa itu *Free Trade and Investment Agreements (FTAs)*?

Free Trade and Investment Agreements (FTAs) atau Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi adalah perjanjian komersil atau investasi antara dua negara atau lebih yang bertujuan membuka investasi di bidang ekonomi dan mengurangi hambatan untuk impor seluruh produk termasuk bahan mentah, barang manufaktur dan pelayanan atau jasa antar negara. Tujuan utama FTAs tersebut adalah untuk memastikan kontrol atas kekuatan ekonomi yang lebih lemah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO. Mereka semakin memperluas kebijakan-kebijakan neoliberal untuk liberalisasi, deregulasi dan privatisasi untuk menghancurkan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang (underdeveloped) untuk kepentingan negara-negara industri kaya.

WTO mencakup hampir seluruh negara di dunia. FTAs di satu sisi hanya mencakup dua negara atau lebih seperti halnya kesepakatan bilateral FTA antara dua negara, atau

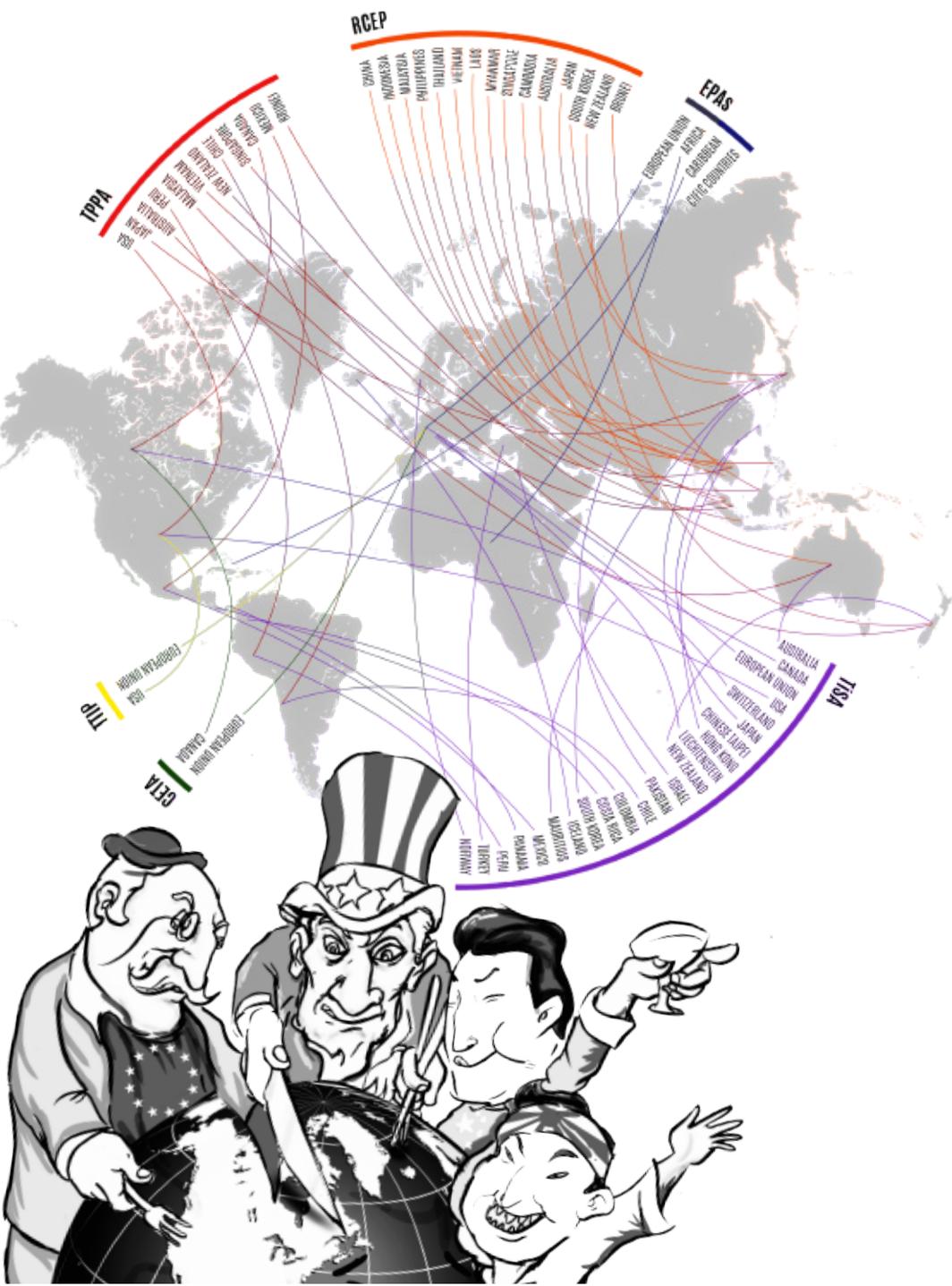
kesepakatan regional/plurilateral. FTA juga mencakup isu yang lebih luas dan mendalam di balik proses perdagangan (beyond trade) – mencakup isu investasi, hak kekayaan intelektual dan jasa – selebihnya mencakup isu yang sama dalam WTO. Singkatnya, FTAs digunakan oleh kapital monopoli sebagai instrumen baru untuk memajukan agenda neoliberal selain dari apa yang bisa dicapai dalam rezim perdagangan multilateral seperti WTO.

Hal ini jelas bahwa FTA beroperasi sedemikian rupa sebagai bentuk lanjutan dari apa yang dihasilkan oleh WTO dalam mendesentralisasi dan mengintensifkan serangan terhadap buruh dan petani di seluruh belahan dunia. Lahirnya mega-FTAs yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan imperialis baik yang telah eksis maupun yang mulai tumbuh seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Jepang juga menunjukkan bagaimana dunia dikuasai dan dibagi-bagi oleh segelintir negara kaya dan berkuasa – mereorientasi rantai pasok pasar berdasarkan kepentingan mereka dalam mengamankan keuntungan dan kontrol atas “wilayah pengaruh/sphere of influence” milik mereka.

FTAs pertama kali diajukan pada akhir 1960-an, yang kemudian semakin dikembangkan pada awal tahun 2000-an sebagai negosiasi WTO dalam Doha Round (Putaran Doha) yang menjadi penanda kesepakatan. Pada akhir tahun 2014, ada 2.903 perjanjian investasi bilateral dan 345 kesepakatan investasi lainnya yang dijalankan, sehingga total kesepakatan investasi berjumlah 3.268. Kesepakatan perdagangan yang lebih luas atau secara umum dikenal sebagai mega-FTAs seperti RCEP dan TPP saat ini muncul dengan perlindungan investasi dengan provisi serupa yang secara umum ditemukan dalam berbagai perjanjian investasi bilateral.

Apa itu TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement)?

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) atau Kesepakatan Kerjasama Lintas-Pasifik adalah mega-FTA yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang merangkul 11 negara lainnya di Asia Pasifik dan Amerika Latin (Jepang, Australia, Peru, Malaysia, Vietnam, New Zealand, Chili, Singapura, Kanada, Meksiko, Brunei). Dalam penambahan anggota, negara-negara seperti Filipina, Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam negosiasi ini. Kesepakatan dagang ini mewakili 40% GDP global atau 25,5% dari volume total perdagangan dunia. Negosiasi TPPA telah selesai pada bulan Oktober 2015 dan ditandatangani pada bulan Februari 2016. Tetapi, untuk menjalankan kesepakatan ini, maka harus diratifikasi oleh segenap negara



anggota hingga merepresentasikan sekurang-kurangnya 80% dari total GDP seluruh anggota TPP.

Lebih dari sekadar kesepakatan dagang, TPP memainkan peranan penting dalam skema Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kembali perhatian, dan mempertahankan hegemoninya di Asia Pasifik. Peluang membuat aturan perdagangan yang akan mengontrol separuh perdagangan dunia dan mengatur sebuah wilayah raksasa yang memiliki 57% GDP global membuat Amerika Serikat dan sekutunya terus mendorong lahirnya TPPA. Dalam Konferensi APEC Honolulu pada tahun 2011, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Wakil Presiden Hillary Clinton menegaskan bahwa TPP dibentuk sebagai kekuatan ekonomi dari strategi geopolitik Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi mereka di Asia Pasifik dengan menciptakan rezim legal dengan wilayah-luas yang melayani kepentingan mereka dan dapat dijalankan oleh Amerika Serikat dan korporasi dalam negeri mereka. Ketika dijalankan, TPPA akan menerapkan aturan ketat terhadap hak kekayaan intelektual, belanja pemerintah, badan usaha milik negara, dan perlindungan investasi, untuk keuntungan dan perlindungan bagi korporasi multinasional.

Apa itu *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*?

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh yang dipimpin oleh Cina masih dalam proses negosiasi antara 10 negara anggota ASEAN dan enam negara mitra utama Cina. Negosiasi ditargetkan rampung pada tahun 2017. Tidak ada draft teks yang dapat diakses publik tetapi bocoran teks negosiasi menunjukkan hal serupa dengan TPPA dan di beberapa bab bahkan lebih berbahaya daripada yang ditunjukkan oleh TPPA.

Cina mendorong RCEP sebagai serangan balik terhadap serangan ekonomi US. FTA yang dipimpin Cina ini mencakup Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand dan 10 negara anggota ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam). Beberapa putaran negosiasi telah dilakukan secara tertutup. Prespektif anggota TPP semakin menunjukkan adanya keinginan berpartisipasi dalam RCEP yang dipimpin Cina karena semakin merosotnya pengaruh US di Asia Pasifik dan kekuatan Cina tumbuh semakin penting di wilayah ini. Ekspor Cina di Asia melonjak hingga 50% sejak awal masa krisis mereka, sedangkan ekspor ke US meningkat sekitar 15%. Nilai ekspor Cina mencapai 90 Miliar USD yang merupakan

tiga kali lipat lebih besar dari nilai ekspor mereka ke US.

Ukuran cakupan RCEP hampir melampaui TPP. Bersama 16 anggotanya, yang mencakup dua kekuatan utama ekonomi Asia, yakni Cina dan India, terhitung hampir separuh dari jumlah populasi dunia, hampir 30% dari GDP global dan lebih dari seperempat dari total ekspor dunia. Isi perjanjiannya hampir sama dengan TPP yang memasukkan perdagangan barang, jasa, investasi, kekayaan intelektual (termasuk paten atas obat-obatan, hak cipta, indikator geografis, sumber daya genetik, dan lain-lain).

Bagaimana FTAs tersebut akan mengintensifkan eksploitasi atas pekerja?



Mega-regional FTA tersebut didesain sedemikian rupa untuk memfasilitasi akses yang semakin besar bagi korporasi untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan kekayaan alam dari negara-negara sedang berkembang. Hal ini akan meneruskan kemerosotan upah dan standar lingkungan kerja sebab negara-negara akan semakin berlomba untuk mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi – dan sebaliknya semakin tidak bersahabat bagi para buruh.

Ukuran perlindungan investasi yang telah digunakan saat ini telah menyebabkan kemerosotan upah. Di tahun 2013, Veolia Proprete, sebuah perusahaan TNC Prancis menggugat pemerintah Mesir yang telah membuat Undang-Undang baru tentang Tenaga Kerja yang meningkatkan upah minimum nasional. Veolia menuntut US\$110 Juta dari pemerintah Mesir sebagai kompensasi atas kegagalan pemerintah dalam mengganti

'keuntungan yang hilang' akibat menaikkan upah pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang domestik baru tentang Tenaga Kerja. Veolia mengklaim bahwa Mesir telah mengingkari kewajiban (obligasi) kontrak untuk menjaga upah sesuai kenaikan biaya sehingga penetapan upah secara tiba-tiba telah berdampak negatif terhadap investasi perusahaan. Klaim hukum yang digunakan sesuai dengan kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) atau Perjanjian Investasi Bilateral yang ditandatangani antara Mesir dan Perancis tahun 1974. BIT antara Perancis dan Mesir tersebut memberikan hak kepada korporasi untuk mengklaim penyesuaian upah sesuai kenaikan biaya yang mencakup inflasi dan penetapan upah minimum.

Perjanjian sebelumnya juga telah menyebabkan pekerja dalam kondisi upah yang rendah yang terjadi semakin luas di berbagai belahan dunia. Di tahun 1994, ketika NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement) atau Kesepakatan Perdagangan Bebas Atlantik Utara yang telah ditandatangani oleh Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko, para ekonom dan pemerintah US telah memprediksi dapat menghasilkan ratusan ribu pekerjaan untuk memenuhi pertumbuhan surplus perdagangan dengan Meksiko. Hasilnya justru telah menyebabkan 682.900 orang Amerika yang kehilangan pekerjaan dan penggusuran lebih dari satu juta petani Meksiko dan yang tak terhitung lagi kemerosotan upah, fleksibilisasi pekerja, dan peningkatan migrasi paksa. Jika disahkan, TPP dan RCEP akan semakin memaksa negara-negara anggotanya untuk mengadopsi standar yang sama dalam perlindungan investasi yang menunjukkan ancaman luar biasa terhadap hak pekerja di berbagai wilayah.

Bagaimana FTAs tersebut akan mengintensifkan eksploitasi terhadap kaum tani dan penggarap?

Sebagai bagian dari aturan FTAs, perenggangan hambatan perdagangan di antara negara-negara ekonomi yang lebih lemah akan memperbolehkan dumping impor produk pertanian murah dari negara-negara industri kaya. Produk tersebut mendapat subsidi yang tinggi dan dapat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada produk lokal. Kekacauan perdagangan semacam ini telah menempatkan kaum tani dalam risiko kehilangan pertukaran yang adil dalam pasar dan bahkan dapat menyebabkan kehancuran total sistem produksi pertanian lokal.

FTAs tersebut juga menerapkan standar kekayaan intelektual yang mengatur secara ketat penggunaan hak paten atas benih dan varietas tanaman sehingga mengancam petani lokal dan praktik kearifan lokal pertanian serta akses atas benih. Berdasarkan bocoran bab dalam negosiasi RCEP tentang hak kekayaan intelektual, Jepang dan Korea

mendorong negara anggota RCEP untuk bergabung dalam UPOV 1991. UPOV 1991 adalah sebuah kesepakatan internasional yang menerapkan serangkaian standar umum dan mengatur bagaimana negara-negara mesti menerapkan proteksi varietas tanaman – sebuah skema yang menguntungkan perusahaan benih dalam mengambil hak petani atas benih dengan cara menempatkan kekuatan perusahaan untuk memperoleh hak eksklusif atas jenis-jenis benih tertentu. Proposal lainnya ditujukan untuk kriminalisasi penyimpanan benih melalui penerapan sanksi kriminal atas tindakan membawa benih lintas batas tanpa izin dari pemilik hak paten.



Karena TPP dan RCEP mengadopsi standar baru dalam perlindungan investasi, maka FTAs tersebut juga menghambat upaya untuk ditribusi lahan yang sejati (reforma agraria). pada bulan

Juli 2015, sebuah tribunal korporasi menuntut Zimbabwe untuk pengembalian lahan pertanian yang didistribusikan pemerintah kepada masyarakat adat petani Zimbabwe pada tahun 2005. Pemilik lahan mengaskan bahwa penyitaan dan keputusan sepihak pemerintah yang telah menciptakan ‘pemukiman ilegal petani’ merupakan pelanggaran atas perjanjian investasi bilateral antara Swiss dan Jerman. Sebagai tambahan tuntutan dalam pengembalian lahan pertanian kepada pemilik sebelumnya, pemerintah Zimbabwe juga dituntut membayar US\$ 65 juta sebagai kompensasi atas nilai yang hilang.

Bagaimana FTAs tersebut akan menghilangkan akses rakyat atas kualitas pelayanan publik?

Serangan agresif neoliberal terus menekan pembukaan pasar seluas-luasnya di berbagai aspek yang secara tradisional diklasifikasikan sebagai pelayan esensial yang wajib dipenuhi oleh pemerintah seperti kesehatan, air, listrik, dan pendidikan.

FTAs tersebut bermaksud meneruskan perihal hak paten obat-obatan yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan besar farmasi untuk mengklaim hak eksklusif dalam memproduksi obat-obatan tertentu. Kepemilikan eksklusif atas paten obat membolehkan perusahaan memonopoli pasar obat dan menetapkan harga yang tinggi

tanpa kompensasi untuk penyediaan obat generik alternatif. Jika disahkan, RCEP dan TPP akan menguatkan perlindungan atas praktik monopoli sebagaimana yang dibutuhkan dalam kesepakatan internasional demikian juga dalam Undang-Undang domestik. Hal ini menunjukkan sebuah ancaman besar terhadap mayoritas rakyat miskin yang bergantung pada obat-obatan murah untuk keselamatan hidupnya.



Lebih lanjut, baik TPP dan RCEP ditujukan untuk percepatan privatisasi sistem pelayanan kesehatan publik dan pelayanan sosial secara umum. Di bawah kesepakatan TPP, pelayanan sosial vital seperti kesehatan, komunikasi, air, listrik, badan usaha milik negara dan transportasi satu sama lain akan dibuka kepada perusahaan milik asing. FTAs tersebut juga berisikan ketentuan yang memperbolehkan korporasi untuk secara langsung menguji aturan-aturan hukum yang memproteksi pelayanan sosial tersebut dari upaya privatisasi. Ketika diprivatisasi, pelayanan publik vital dan berkualitas tidak akan bisa lagi diakses oleh mayoritas rakyat miskin dan marjinal sebab pelayanan tersebut akan mengalami peningkatan harga.

Bagaimana FTAs tersebut akan berdampak pada tanah, kehidupan dan mata pencaharian bangsa minoritas?

Dengan segala tujuan untuk menarik investasi asing besar-besaran, pemerintah menegosiasikan perjanjian investasi dengan negara lain sambil menjanjikan hal-hal menarik kepada para investor. Fitur modern FTAs ini secara efektif mengarah lebih cepat hingga ke regulasi publik paling bawah dimana negara-negara ekonomi lemah secara esensial dipaksa untuk melepaskan hak mereka dalam mengatur tindakan perusahaan demi mendorong investasi yang lebih banyak. Ketika FTAs tersebut diterapkan, tenaga kerja, lingkungan dan bahkan ketentuan kepemilikan lahan oleh pihak asing dalam berbagai regulasi yang termaktub dalam konstitusi negara akan diamandemen demi memberikan jalan untuk penguasaan dan keuntungan korporasi.

Sebuah perusahaan tambang Kanada, Bear Creek Mining Corporation menggugat pemerintah Peru karena memberikan hak kepada kelompok masyarakat adat untuk menerima atau menolak pertambangan atau operasi pengeboran di wilayah mereka. Kejadian ini merupakan lanjutan dari peristiwa pada tahun 2007 ketika Bear Creek memulai operasi tambang silver di Santa Ana. Kelompok masyarakat adat memprotes perusahaan tambang karena kekhawatiran bahwa operasi tambang akan merusak Danau Titicaca. Serangkaian protes dan blokade dihadapi dengan kekerasan dari pihak Kepolisian yang menyebabkan enam orang meninggal. Investor melakukan gugatan terhadap pemerintah Peru berdasarkan FTA Kanada-Peru akibat hilangnya keuntungan investasi mereka.

Lebih lanjut, standar FTAs modern baik RCEP dan TPP memberikan hak kepada korporasi untuk mendapatkan tanah di negeri lain yang akan meningkatkan perampasan tanah antar negara berkembang. Di Sudan Selatan, para investor asing telah menguasai tanah seluas 2,64 juta hektar lahan pertanian dalam kurun waktu tiga tahun dari 2007 hingga 2010 yang telah menyebabkan ribuan petani masyarakat adat kehilangan tanah (landless). Dengan menghitung kasus akuisisi lahan, total penguasaan asing atas lahan di negara tersebut mencapai lebih dari 5.64 juta hektar atau 9 persen dari total wilayah Sudan Selatan. Ketika mega-FTAs ini diterapkan, korporasi dengan bebas menguasai kekayaan di suatu lahan yang paling banyak berada di wilayah dan tempat sakral masyarakat adat dan suku bangsa minoritas.

Mengapa FTAs tersebut menjadi gambaran semakin sengitnya rivalitas antar imperialis antara Amerika Serikat dan Cina?

Dua kesepakatan dagang mega-regional tersebut (TPPA dan RCEP) mencerminkan persaingan kepentingan antara US dan Cina untuk menunjukkan siapa yang mengatur perdagangan dan kontrol terhadap ekonomi di satu wilayah. Akses dan kontrol terhadap pasar besar Asia Pasifik dibutuhkan oleh US yang secara ekonomi mengalami kemerosotan, begitupun bagi Cina yang telah memperluas wilayah pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik tetapi saat ini juga mengalami perlambatan ekonomi. US menggunakan TPP dan TTIP untuk mengontrol ekonomi global demi kepentingan korporasi mereka, Cina melalui RCEP, merapatkan relasi ekonomi terdekat mereka dengan ASEAN, yang merupakan ekonomi terbesar ketiga dan pasar terbesar ketiga di Asia. Wilayah Asia Pasifik masih menyisahkan kekuatan untuk pertumbuhan di tengah lambatnya pemulihan global. Asia Pasifik merupakan tempat dimana pemrosesan manufaktur dunia dan memproduksi hampir separuh dari output ekonomi dunia yakni

40.7% atau setara USD 44.1 Triliun. Ini diproyeksikan terus meningkat sebab GDP di wilayah lain mengalami kemerosotan.

Delapan dari 10 pelabuhan kontainer tersibuk di dunia berada di wilayah Asia Pasifik, hampir 30 persen rute perdagangan maritim dunia melintas di laut Cina Selatan/Laut Filipina Barat setiap tahunnya sementara itu, sekitar \$1.2 triliun nilai produk yang dibawa ke Amerika Serikat transit melalui rute laut Asia Pasifik. Kekayaan sumberdaya alam, tenaga kerja murah dan rute perdagangan vital di wilayah ASEAN membuat wilayah ini sebagai target strategis bagi ekonomi Amerika Serikat dan Cina, kontrol politik dan militer.

Dalam konteks ini, Amerika Serikat melanjutkan untuk menerapkan strategi 'Pivot to Asia'. Dalam upaya mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik, eskalasi operasi militer ditingkatkan melalui penempatan puluhan ribu pasukan dan mempertahankan ratusan basis militer di Asia Pasifik. Di Jepang dan Korea saja terdapat 80.000 personil militer AS – jumlah yang jauh berbeda dari 65.000 pasukan yang ditempatkan di Eropa dan 35.000 ditempatkan di Timur Tengah. Di sisi lain, Cina terus mengembangkan modernisasi substansial kekuatan militer kelautan dan kemampuan angkatan laut mereka untuk selangkah lebih menunjukkan kekuatan mereka di Laut Cina Selatan/Filipina Barat. Hal ini semakin menguatkan penguasaan karang dan pembangunan landasan pangkalan militer yang semakin meningkatkan ketegangan dengan pesaing lainnya - Filipina dan Vietnam. Pembangunan kekuatan militer di wilayah ini telah menjadi peringatan. Di samping peningkatan kekuatan militer yang ditunjukkan oleh AS dan Cina, negara lainnya di wilayah Asia Pasifik seperti Australia, Singapura, dan Jepang juga terus menyiapkan arsenal mereka.

Di dalam kondisi tensi perang seperti ini, perhatian rakyat sesungguhnya bukan tentang siapa yang akan menang. Karena, baik TPP ataupun RCEP, baik Amerika Serikat maupun Cina dan korporasi negara mereka tidak akan bisa memenuhi aspirasi rakyat yang telah lama disuarakan untuk perdagangan yang adil, fair, dan memenuhi kebutuhan rakyat.

Bagaimana rakyat berjuang dan melawan lahirnya FTAs? Apa yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perlawanan terhadap FTAs?

Kehancuran yang semakin meluas yang merupakan ancaman dari RCEP dan TPP terhadap ekonomi dan rakyat di suatu wilayah telah memajukan kontradiksi fundamental

sistem ekonomi neoliberal saat ini. Dikarenakan kekuatan ekonomi adidaya berupaya mengamankan kepentingan mereka di satu wilayah, maka perlawanan rakyat menjadi perihial yang sangat krusial dalam menggagalkan mega-FTAs tersebut (TPP dan RCEP). Kondisi saat ini sangat tepat untuk segera memajukan gerakan rakyat melawan TPPA, RCEP dan FTAs lainnya di satu wilayah dan perihial penting dalam upaya ini adalah mengorganisasikan aksi rakyat di Asia Pasifik.

Peningkatan kesadaran dan program edukasi – ada urgensi untuk terus mengembangkan program peningkatan kesadaran massa dan penyebarluasan informasi untuk membumikan isu, dan menjelaskan dampak FTAs terhadap rakyat. Berbagai bentuk media baik online dan cetak dapat dan seharusnya disediakan untuk memenuhi tujuan ini. Ada kebutuhan untuk mempelajari lebih lanjut FTAs dan melaksanakan diskusi luas tentang dampak TPPA dan RCEP terhadap suatu negara dan secara spesifik terhadap setiap sektor. Program pendidikan juga krusial untuk memahami lebih dalam tentang isu ini (TPPA dan RCEP) yang dapat diselenggarakan melalui konferensi, forum, webinar atau serangkaian studi tentang FTAs yang kontekstual dengan skema neoliberal globalisasi. Upaya-upaya tersebut mesti dilaksanakan antar serikat buruh, organisasi tani, organisasi perempuan, kelompok masyarakat adat, aktivis lingkungan, miskin kota, aktivis hak asasi manusia, asosiasi pengusaha kecil dan sedang, akademisi, dan kalangan profesional untuk mendorong terbentuknya sebuah kampanye multi-sektoral untuk menentang FTAs dan neoliberal globalisasi.

Mengorganisasikan massa – tugas yang sama pentingnya adalah kemestian membangun gerakan massa secara luas melawan FTAs dan neoliberal globalisasi. Platform dan jaringan luas tersebut dapat dibangun dalam bentuk



kampanye yang lebih maju, dan harus mencakup semua sektor seperti buruh, petani, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat adat dan suku bangsa minoritas. Aliansi antara rakyat di belahan utara (global north) dan belahan selatan (global south) mesti dibangun dan diperkuat dengan melakukan koordinasi-aksi dan mobilisasi global.

Kampanye dan mobilisasi – kampanye melawan FTAs membutuhkan berbagai macam aksi yang mendukung dan menguatkan satu sama lain. Fokus utama kampanye melawan FTAs mesti dipusatkan pada mobilisasi massa untuk meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah sedemikian rupa sehingga memperoleh capaian konkrit. Sebagai contoh, dalam dekade ini perjuangan tani, nelayan, dan produsen skala kecil telah dibolehkan melawan perampasan tanah, mengurangi sewa tanah dan memperbaiki kondisi pekerja secara umum di beberapa negara. Beberapa serikat buruh telah memperoleh kemenangan di berbagai belahan dunia yang terus melakukan kampanye, edukasi politik, dan berbagai bentuk protes menggaungkan isu rakyat dan secara kuat menentang neoliberal globalisasi.

Advokasi kebijakan dan lobi – saat ini, sejumlah organisasi telah menempatkan perhatian pada tindakan tidak langsung seperti lobi dan advokasi kebijakan. Kerja lobi dan advokasi kebijakan meliputi upaya tekanan terhadap pemerintah dan institusi yang memfasilitasi munculnya FTAs. Lobi juga dapat membantu pencapaian tujuan dari kerja kampanye massa melalui penyediaan pengetahuan dan wawasan lebih dalam (in-depth knowledge and insight) pada isu-isu spesifik, dan dapat memecah aliansi diantara pemerintah dan institusi. Oleh karena itu, kampanye seputar isu tersebut perlu melakukan tekanan terhadap badan-badan pemerintah baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dan juga berkontribusi dalam pembangunan gerakan rakyat yang mengadvokasi sistem ekonomi alternatif secara global yang dibangun atas prinsip solidaritas, saling menguatkan, saling menguntungkan dan kerjasama.

Dalam rangka menggagalkan serangan neoliberal, maka sangat penting untuk menguatkan gerakan dan seluruh sektor melawan FTAs dan mengintensifkan kampanye melawan penguasaan korporasi atas kekayaan dunia, tenaga kerja, dan sumberdaya alam. Untuk mencapai tujuan ini, peningkatan kesadaran, pengorganisasian massa, dan kampanye mesti menjadi komponen vital dalam pekerjaan kita sehingga buruh, petani, perempuan, masyarakat adat, buruh migran, kaum miskin kota, pemuda dan golongan mayoritas demokratis lainnya dapat menuntut secara komprehensif dan menunjukkan artikulasi yang kuat dalam perlawanan terhadap FTAs dan sistem yang telah membusuk di seluruh belahan dunia.

Publikasi ini dibuat dengan bantuan dari organisasi berikut:

Asian Peasant Coalition (APC)
Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)
International Indigenous Peoples Movement
for Self-Determination and Liberation (IPMSDL)
International Migrants Alliance (IMA)
International Women's Alliance (IWA)
Kalikasan Peoples Network for the Environment
Peoples Coalition on Food Sovereignty (PCFS)
Pesticide Action Network - Asia Pacific (PAN-AP)
IBON International
WORKINS
Asia Pacific Research Network (APRN)
International League of Peoples Struggles (ILPS)



INDIES
THE INSTITUTE FOR NATIONAL AND DEMOCRATIC STUDIES